

PENGEMBANGAN PARIWISATA JAWA TENGAH BERBASIS ECOLOGY MARINE TOURISM

by Izza Mafruhah

Submission date: 12-Jun-2020 03:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 1342449024

File name: 4.3_-_Jurnal_Nasional.pdf (599.21K)

Word count: 4256

Character count: 27907

PENGEMBANGAN PARIWISATA JAWA TENGAH BERBASIS ECOLOGY MARINE TOURISM

*THE DEVELOPMENT OF CENTRAL JAVA TOURISM BASED ON ECOLOGY MARINE
TOURISM*

Adenathera L Dewa¹, Lely Ratwianingsih² Izza Mafruhah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Maritim dan Transpor AMNI

Jl. Soekarno Hatta No.180, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246.

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

Jl Ir Sutami No 36 Ketingan Jebres Surakarta Jawa Tengah

Email: adenanthera.l.dewa@gmail.com

Diterima: 2 Mei 2018, Direvisi: 12 Mei 2018, Disetujui: 4 Juni 2018

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau besar dan kecil sehingga merupakan potensi sangat besar untuk dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata. Pemeliharaan dan perlindungan ekologi laut menjadi bagian penting, oleh sebab itu *ecomarinetourism* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seluruh stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan yang merupakan perubahan dari ekonomi coklat menuju ekonomi hijau. Berbasis pada prinsip keberlanjutan, terutama berfokus pada pengalaman dan belajar tentang alam, dikelola secara etis, non-konsumtif, secara lokal berorientasi dan berkontribusi pada konservasi dan pelestarian. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengeksplorasi profil wisata di Provinsi Jawa Tengah; 2) Menganalisis prioritas faktor pendukung pengembangan pariwisata; 3) mengidentifikasi regulasi kepariwisataan di Jawa Tengah 4) Menyusun peran serta stakeholder dalam pengembangan wisata. Penelitian ini menggunakan *mixed method* dengan alat analisis statistik deskriptif yang dipadukan dengan analisis kualitatif, dan analisis AHP yang dipadukan dengan *Focus Group Discussion*. Hasil menunjukkan bahwa wisata yang paling banyak diminati adalah wisata alam khususnya kelautan dan ekologi. Faktor pendukung dalam pengembangan model wisata adalah faktor infrastruktur, kelembagaan dan internal pelaku usaha. Peraturan perundangan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda).

Kata kunci : Kelautan, ekologi, pariwisata, pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

Indonesia is an archipelago with 17,504 large and small islands, so it is a huge potential to be developed into a tourist destination. Marine ecology protection is an important part, therefore Ecomarinetourism is one form of responsibility of all stakeholders in sustainable development which is a change from the brown economy to a green economy based on the principle of sustainability, mainly focusing on experience and learning about nature, managed ethically, non - Consumptive, oriented and contributing to conservation and preservation. The purpose of this study is 1) To explore the profile of tourists in Central Java Province; 2) To Analyze the priority of supporting factors for model development; 3) To identify tourism regulations in Central Java 4) To Arrange stakeholder participation in tourism development. This study uses mixed method with a

descriptive statistical analysis tool combined with qualitative analysis, and AHP analysis combined with Focus Group Discussion. The results show that the most sought-after tourism is tourism, especially marine and ecology. Supporting factors in the development of tourism models are the infrastructure, institutional and internal factors of business actors. Regulations that are owned by the Central Java Province are indicated by the preparation of the Regional Tourism Development Master Plan (Riparda).

Keywords : Marine, Ecology, Tourism, Sustainability Development

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah wisata yang cukup banyak, karena potensi wisata yang luar biasa baik alam maupun buatan. Potensi alam meliputi potensi, flora dan fauna, keindahan alam kekayaan adat istiadat, kebudayaan, dan bahasa. Wisata buatan yang saat ini terus dikembangkan baik yang berbasis wisata belanja, wisata kuliner maupun desa wisata dengan suasana *back to nature*, dan secara geografis tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perpaduan antara wisata alam dan wisata buatan saat ini menjadi daya tarik unggulan untuk dikembangkan. Potensi-potensi tersebut menjadi daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di sisi lain Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar untuk dikembangkan hanya saja sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Ecotourism merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seluruh stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan yang merupakan perubahan dari ekonomi coklat menuju ekonomi hijau. Berbasis pada prinsip keberlanjutan, terutama berfokus pada pengalaman dan belajar tentang alam, dikelola secara etis, non-konsumtif, secara lokal berorientasi dan berkontribusi pada konservasi dan pelestarian. *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan dalam mengkoordinasi

nasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan *sustainable development* di dunia menyatakan bahwa konsep *green economy* ini mendukung pemasangan nilai ekonomi ke sumber daya alam kita. *Millenium Development Goals* yang sekarang dikembangkan menjadi *Sustainable Economic Goals* mempunyai agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan. PBB telah mengadopsi Perlindungan dan Pemulihan Ekosistem untuk mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, hutan, desertifikasi, eliminasi degradasi/keanekaragaman hayati. Ekowisata adalah sebuah upaya penting dan dapat memainkan peran penting dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (Ashok, Tewari, Behera, & Majumdar, 2017).

Pada negara berkembang perwujudan bentuk pariwisata memiliki berbagai akar, prinsip dan pemangku kepentingan, dihadapkan dengan kesulitan dan kompleksitas karena manajemen yang buruk; kapasitas institusional terbatas; dana tidak mencukupi; sistem regulasi yang tidak efisien; pengetahuan terbatas; tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Wisata berbasis ekologi membutuhkan pembentukan, pengembangan dan berkelanjutan dan kesetaraan antara penduduk asli dan wisatawan. Perencana dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan semua prinsip dasar ekowisata dalam perencanaan, pengembangan, operasi dan pemasaran.

Kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang luas dan adopsi yang tidak pantas pendekatan bersama dengan kesalahpahaman konsep ekowisata, khususnya di negara berkembang. Wisata belum meningkatkan kesejahteraan orang lokal tetapi telah berubah menjadi sumber utama ketidaksetaraan ekonomi, konflik sosial dan ketidakberlanjutan ekologis (Mosammam, Sarrafi, Nia, & Heidari, 2016).

Industri pariwisata terbentuk dari tarik menarik antara *costumer* (wisatawan) dan *supplier* (penyedia industri wisata) atau permintaan dan penawaran. Tingginya permintaan dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang tersebut, harga barang lain dan selera (Mankiw, 2008). Dalam industri wisata penentuan harga bisa dihitung dengan menggunakan *willingness to pay*, namun dalam penelitian ini tidak masuk dalam harga yang diterima oleh wisatawan.

Faktor penting dalam pengembangan pariwisata adalah regulasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ekowisata yang belakangan ini telah menjadi *trend* dalam kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menjelaskan bahwa ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam mengelola potensi ekowisata. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa prinsip pengembangan ekowisata meliputi:

1. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
4. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan;
7. Menampung kearifan lokal.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup

Jepang menyatakan bahwa salah satu cara untuk menyeimbangkan pembangunan daerah dengan pelestarian lingkungan alam dengan menggunakan media promosi sehingga berfokus pada ekowisata. Alam dianggap sebagai *natural world heritage* yang harus dilestasikan, hasil upaya ini adalah konservasi Pulau Yakushima yang berhasil dengan sukses (Song & Kuwahara, 2016). Perpaduan yang erat dan seimbang antara pembangunan dan kelestarian alam ini akan memunculkan satu model ekowisata.

Ekowisata sebagai industri pariwisata merupakan bagian dari *cultural industry* yang melibatkan seluruh masyarakat. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang terlibat, namun pengaruh sosial lebih luas seperti terjadinya ketimpangan/kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pengaruh pariwisata terhadap masyarakat merupakan bagian dari terjadinya perubahan proses sosial masyarakat, yang di dalamnya terdapat kerjasama dan persaingan antara pelaku pariwisata. Proses sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok, berdasarkan potensi atau kekuatan masing-masing. Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat dimana terdapat proses hubungan antar manusia berupa interaksi sosial yang terjadi secara terus-menerus. Terbentuknya interaksi sosial terjadi antara kontak sosial dan komunikasi sosial. Berdasarkan pembahasan tersebut maka proses sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kerjasama, persaingan, pertikaian/pertentangan, dan akomodasi (Idajati, Pamungkas, & Vely Kukinul, 2016).

Penelitian yang dilakukan Ferdinan tentang Pengembangan wisata alam berbasis ekowisata dalam perspektif pelayanan publik (studi pada Disparbud Kabupaten Nganjuk) mempunyai kesim-

pulan program pengembangan objek wisata belum berjalan dengan baik, masih belum maksimal karena berhubungan dengan alam sehingga sering terjadi kendala yang disebabkan oleh alam. Pengembangan pariwisata membutuhkan peran serta masyarakat (Ferdinan, Makmur, Ribawanto, 2015).

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17,504 pulau besar dan kecil dipisahkan oleh 12 lautan dan 47 selat. Oleh sebab itu pembangunan wisata berbasis kelautan juga mulai mendapatkan perhatian. Wisata laut sangat beragam mulai dari wisata *diving* dan *scubing*, memancing sampai dengan kuliner laut yang sangat menarik hati. Jawa Tengah memiliki beberapa kawasan wisata laut yang sangat elok dan layak untuk dikembangkan, namun selama ini ekologinya kurang mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik, dengan pertimbangan penjagaan kelestarian sumberdaya pesisir agar berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan potensi utama yang ada di daerah sehingga akan diperoleh langkah yang paling tepat dan sesuai. Aspek *demand* pariwisata terus mengalami peningkatan karena semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, terjadi perubahan dalam skala kebutuhan dasar (*basic need*), di mana *refreshing* dengan pariwisata menjadi salah satu kebutuhan primer. Pemahaman ini menyebabkan jumlah wisatawan dari waktu ke waktu terus meningkat, bukan hanya wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata andalan. Jumlah wisatawan yang masuk ke Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Wisatawan di Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 - 2016

Tahun/ Year	Wisatawan/ Visitors		Jumlah/ Total
	Mancanegara/ International	Domestic/ Domestic	
2011	392 895	21 838 351	22 231 246
2012	372 463	25 240 021	25 612 484
2013	388 143	29 430 609	29 818 752
2014	419 584	29 852 095	30 271 679
2015	375 166	31 432 080	31 807 246
2016	578 924	36 899 776	37 478 700

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

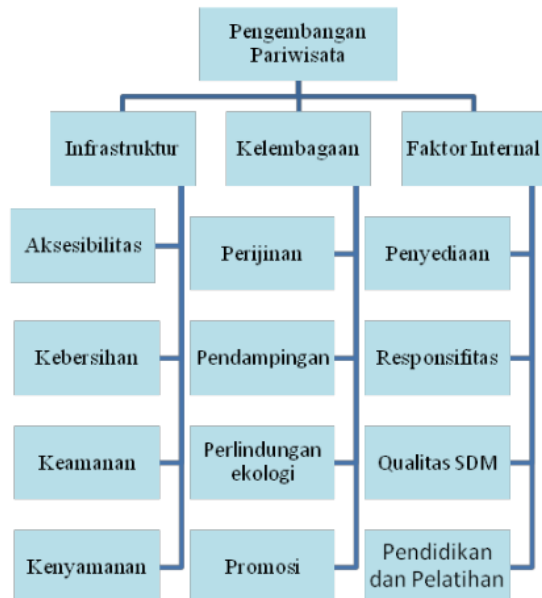
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2011 sampai dengan 2016 terjadi kenaikan mencapai 68,6 persen, sedangkan untuk wisatawan asing pertumbuhannya mencapai 47,4 persen. Provinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan pariwisata yang terdiri atas alam, baik pegunungan, pantai, lautan maupun potensi alam lainnya, wisata *heritage* yang terdiri atas berbagai warisan budaya seperti candi, keraton, dan peninggalan lainnya. Potensi wisata buatan misalnya berupa *water boom*, bangunan tempat ibadah dan lainnya, serta wisata kuliner dan masih banyak lagi. Munculnya *trend* kembali ke alam (*back to nature*) selama dasawarsa terakhir disertai pemahaman untuk kelestarian lingkungan hidup mendorong semakin besarnya minat masyarakat untuk beralih menuju wisata alam. Wisata alam terbesar di Jawa Tengah adalah pegunungan dan kelautan, sehingga dibutuhkan peran dalam pengembangan wisata. Berangkat dari

latar belakang tersebut, maka diperlukan model pengembangan potensi pariwisata berbasis *ecology* dan *marine*.

Sesuai dengan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengeksplorasi profil wisatawan di Provinsi Jawa Tengah; 2) menganalisis prioritas faktor pendukung pengembangan pariwisata; 3) mengidentifikasi regulasi kepariwisataan di Jawa Tengah; 4) menyusun peran serta stakeholder dalam pengembangan wisata.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan *mixed method*, yaitu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. *Mixed method* dibedakan menjadi *concurrent* yaitu metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara bersamaan dan *sequential* yaitu metode yang dilakukan secara berurutan (Cresswell, 2014). Untuk menjawab tujuan pertama dengan menggunakan statistik deskriptif yang dipadukan dengan analisis kualitatif. Untuk menjawab tujuan kedua dengan menggunakan analisis AHP dengan pohon faktor sebagai berikut :



Gambar 1.
AHP pengembangan pariwisata

Hasil pada tujuan pertama dan kedua akan digunakan untuk menyusun model pengembangan pariwisata berbasis *ecomarinetourism*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik wisata yang terbagi menjadi 3, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Daya tarik wisata alam yang banyak diminati oleh wisatawan antara lain Umbul Jumprit, Bleduk Kuwu, Teluk Penyu, Komplek Gunung Merbabu, Pantai Kartini, Tawangmangu, Bandungan, dan

Karimun Jawa. Daya tarik wisata budaya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah antara lain Museum Sejarah, Masjid Kudus, Candi Gedong Songo, Keraton Surakarta, Klenteng Sam Poo Kong, Kota Lama Semarang dan Candi Borobudur. Daya tarik buatan yang diminati antara lain Atlantik Dreamlan, Waduk Tempuran, Baturaden, Owabong Waterpark, PGS, Batik Lasem, Pasar Klewer, Batik Pekalongan, dan Lawang Sewu.

Secara detail wisata unggulan di Provinsi Jawa Tengah bisa ditunjukkan dengan peta wisata berikut ini.



Gambar 2
Peta Wisata Propinsi Jawa Tengah

Tempat wisata di Provinsi Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, baik berupa wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata belanja maupun wisata kuliner. Unggulan *ecomarine tourism* di Provinsi Jawa Tengah adalah Taman Nasional Karimunjawa, di Kabupaten Jepara. Sebuah pulau dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya yang terdiri atas satu kecamatan. Wisata unggulan di Karimunjawa adalah keelokan alamnya yang masih sangat asri dan belum tersentuh berbagai macam budaya dan polusi yang kurang bagus. Salah satu unggulan di Taman Nasional Karimunjawa adalah penangkaran ikan hiu dan keindahan dasar laut yang bisa dinikmati dengan *diving* atau *snorkeling*. Wisata laut dan alam merupakan perpaduan pas dengan Puri Maerokotjo yang merupakan wisata miniatur Jawa Tengah. Seluruh kabupaten di Jawa Tengah memiliki andil terhadap Puri Maerokotjo dengan

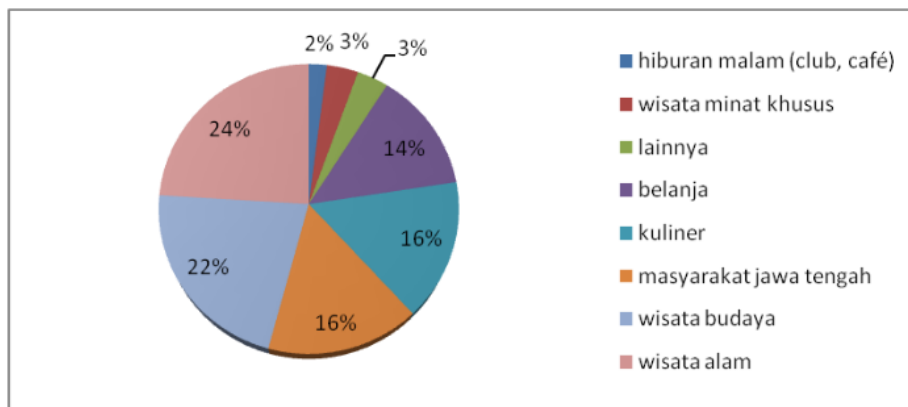
menunjukkan berbagai macam budaya, rumah adat, pakaian adat dan berbagai *souvenir* khas pada masing-masing daerah. Saat ini Puri Maerokotjo berbenah dengan memberikan tambahan wisata yang menarik yaitu hutan *mangrove*, dengan *track* yang mengelilinginya, kapal wisata, dan berbagai hiburan lain yang menarik sebagai wisata keluarga.

Pada tahun 2016, usaha akomodasi hotel di Jawa Tengah terus meningkat dan mencapai sejumlah 1.629 usaha. Pada tahun 2015 persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang sebesar 39,73 persen, sedangkan hotel nonbintang sebesar 30,37 persen. Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan sebanyak 37,48 juta, terdiri atas 578,92 ribu wisatawan asing, dan 36,89 juta wisatawan domestik. Jumlah wisatawan ini meningkat 17,83 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar 31,81 juta. Jumlah usaha restoran/ rumah

makan pada tahun 2016 sebanyak 2.847 atau meningkat 3,45 persen dibanding tahun 2015 yang sebanyak 2.752 usaha.

Daya tarik wisata terbagi menjadi tiga antara lain daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan. Meskipun begitu, wisatawan yang berkunjung memiliki minat masing-masing ketika akan

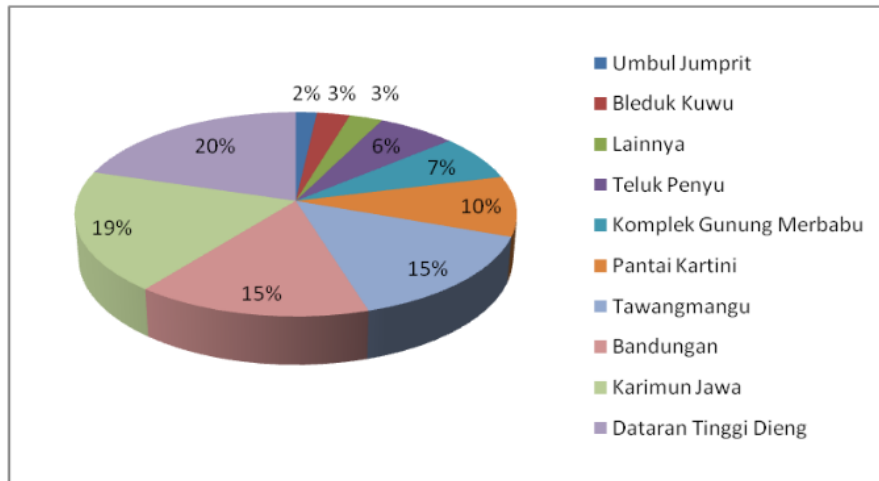
berwisata. Alasan banyaknya wisatawan berwisata di Provinsi Jawa Tengah adalah lokasi provinsi yang memiliki dataran tinggi dan diapit oleh beberapa gunung sehingga wisata alam menjadi minat utama wisatawan berkunjung sebesar 24 persen. Secara detail bisa ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3
Jenis wisata yang disukai Wisatawan Nusantara dari Jawa Tengah

Wisata alam yang paling digemari oleh wisatawan adalah dataran tinggi dieng. Dataran tinggi dieng ini berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Udara yang dingin, sejuk, dan jauh dari polusi menjadi tujuan wisata favorit wisatawan. Selain itu dapat melihat pemandangan yang diperoleh dapat membuat wisatawan merasa puas. Wisata Alam yang diminati kedua adalah Karimunjawa sebesar 19 persen. Karimunjawa yang berlokasi di Kabupaten Jepara ini adalah kawasan

wisata yang menonjolkan pemandangan laut. Wisatawan menyukai kawasan ini karena merasa tertantang harus menyeberangi pulau kecil. Wisatawan juga merasa jika berlibur ke Karimunjawa dapat menikmati pemandangan bawah laut dengan melakukan *snorkling*. Pantai, ombak, dan jauh nya dari hiruk pikuk kepadatan lalu lintas mampu mengurangi kepenatan dalam beraktifitas sehari-hari. Data lebih detail menunjukkan bahwa wisata kelautan menarik wisatawan yang ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 4
Persentase Daya Tarik Wisata Alam yang Disukai Wisatawan Nusantara

Data tersebut mengandung konsekuensi perlunya perlindungan lingkungan sebagai upaya pariwisata berkelanjutan.

Faktor yang mempengaruhi wisata Jateng

Faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata Jawa Tengah bisa dianalisis dengan menggunakan *Analytical Heirarchy Process* sebagaimana ditunjuk-

kan dalam metodologi di atas. Hasil pengolahan dengan AHP adalah sebagai berikut :

Pengolahan dengan menggunakan AHP menunjukkan hasil pada level pertama faktor yang menjadi prioritas adalah faktor infrastruktur dengan nilai 0,46 diikuti oleh faktor internal dengan nilai 0,34 dan faktor kelembagaan dengan nilai 0,20. Sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2
Prioritas faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan potensi level 1

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Infrastruktur	0,46	1
Internal	0,34	2
Kelembagaan	0,20	3

Sumber : data diolah 2018

Hasil tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang terdiri atas kemudahan atau aksesibilitas, kebersihan, kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata. Diikuti oleh faktor internal yang merupakan pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata dan kelembagaan yaitu bagaimana pemerintah berperan dalam

pengembangan pariwisata. Masing-masing faktor mempunyai level dua dengan hasil menunjukkan bahwa pendidikan menjadi peringkat pertama untuk faktor internal diikuti dengan usaha yang dimiliki, potensi daerah dan motivasi masyarakat dalam melakukan usaha. Secara detail ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3
 Prioritas pada faktor yang mempengaruhi faktor infrastruktur level 2

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Aksesibilitas	0,32	1
Kebersihan	0,28	2
Keamanan	0,17	4
Kenyamanan	0,23	3

Sumber : Data lapangan diolah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kemudahan dan keterjangkauan masih menjadi pilihan utama dalam pengembangan pariwisata Jawa Tengah. Faktor lain adalah kebersihan dan fasilitas yang berhubungan dengan kebersihan, karena ketika tempat wisata kotor, maka akan membuat wisatawan untuk tidak kembali lagi ke tempat tersebut. Kenyamanan adalah prioritas ketiga yang

diikuti oleh keamanan sebagai prioritas keempat.

Prioritas pada faktor kelembagaan pada level 2 adalah promosi sebagai peringkat pertama karena akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat tersebut, diikuti oleh perlindungan lingkungan, pendampingan dan perijinan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
 Prioritas pada faktor yang mempengaruhi faktor kelembagaan level 2

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Perijinan/ Legalitas	0,20	1
Promosi	0,32	2
Perlindungan lingkungan	0,26	4
Pendampingan	0,22	3

Sumber : Data lapangan diolah

Adapun hasil pengolahan AHP pada faktor internal, beberapa hal-hal yang

mempengaruhi bisa ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5
 Prioritas pada faktor yang mempengaruhi faktor internal level 2

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Pendidikan dan Pelatihan	0,21	3
Responsifitas	0,31	1
Qualitas SDM	0,21	4
Penyediaan pelengkap wisata	0,27	2

Sumber : Data lapangan diolah

Hasil menunjukkan bahwa ternyata responsifitas dari pelaku usaha di bidang wisata menjadi prioritas utama yang diikuti dengan penyediaan pelengkap wisata sementara kualitas SDM dan

pendidikan pelatihan mempunyai nilai yang sama.

Pariwisata Jateng diatur melalui Perda No 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Jateng Tahun 2012

– 2027. Perda tersebut menyebutkan bahwa visi pembangunan kepariwisataan Jawa Tengah adalah Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi kepariwisataan sebagai berikut

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
- b. Pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. Mengkomunikasikan DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi) dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
- c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional;
- d. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran

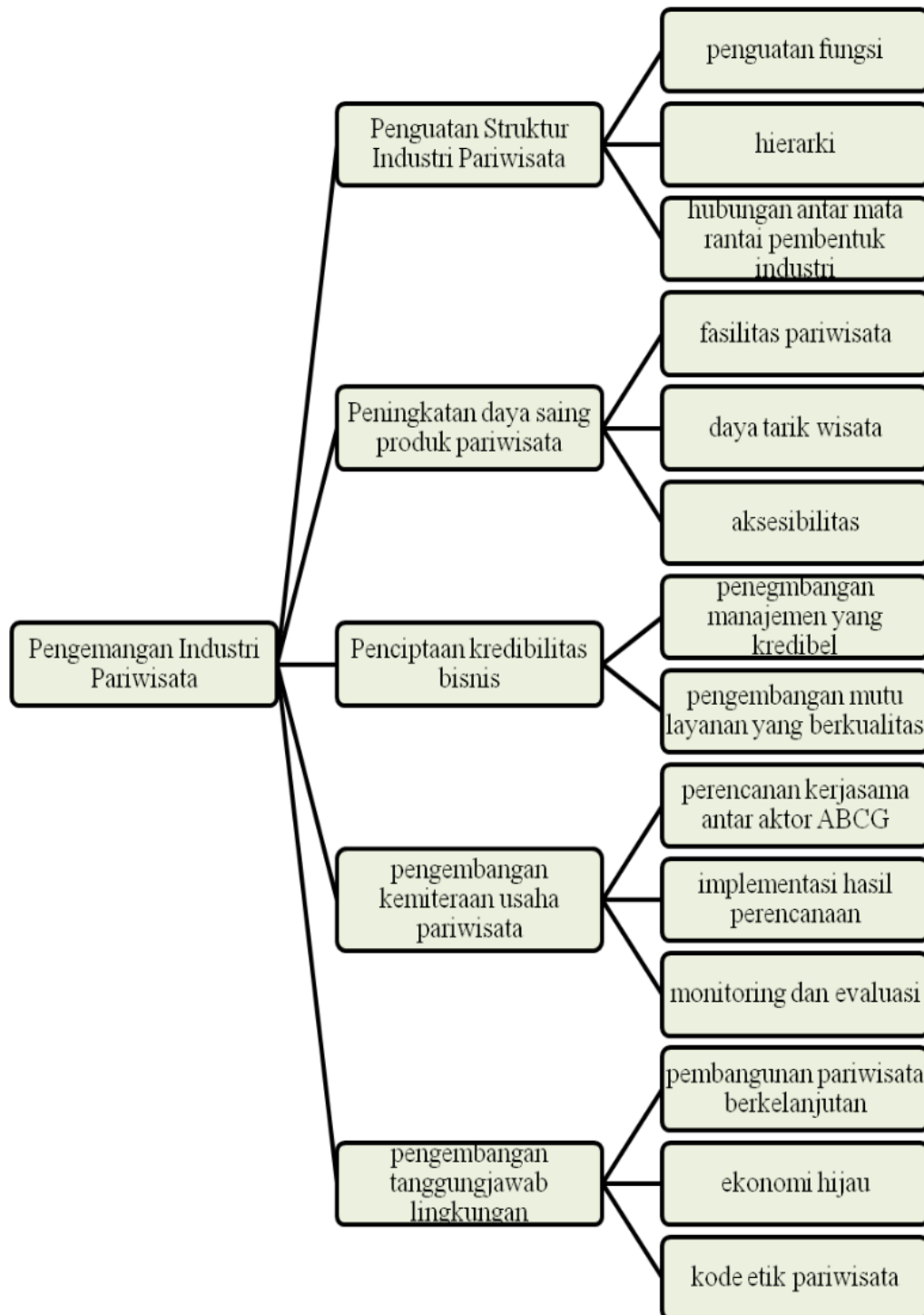
pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Berdasarkan visi misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan maka pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah meliputi: 1) pembangunan destinasi pariwisata; 2) pengembangan pemasaran pariwisata; 3) pengembangan industri yang didukung oleh 4) perumusan kelembagaan kepariwisataan

Keempat arah pembangunan kepariwisataan Provinsi tersebut kemudian dilaksanakan dengan mendasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; pembangunan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan, peningkatan tata kelola yang baik, perencanaan yang dilakukan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Peran Stakeholder dalam peningkatan Pariwisata

Stakeholder mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan pariwisata provinsi, terdapat beberapa aktor atau pelaku dan pembangun pariwisata provinsi yaitu (1) Pemerintah Provinsi yang terdiri atas organisasi pemerintah daerah terkait; (2) Pelaku usaha pariwisata baik dari penyelenggara wisata, pemilik hotel dan restoran maupun pengusaha yang menjadi penyedia souvenir maupun oleh – oleh wisata. Akademisi menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan dan pihak masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan wisata. Stakeholder memiliki keeratatan dalam penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 5
Pengembangan industri pariwisata

Salah satu bagian penting dalam penguatan kelembagaan bagi sektor pariwisata dalam level provinsi adalah meliputi

1. Penguatan organisasi kepariwisataan, yang terdiri atas
 - a. Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan provinsi;
 - b. Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan provinsi;
 - c. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
 - d. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
 - e. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.
2. Pembangunan SDM Pariwisata baik dari aspek kuantitas yaitu terpenuhinya jumlah SDM di lapangan baik sebagai penyedia layanan maupun pelaku usaha. Selain itu maupun kualitas khususnya dalam peningkatan sadar wisata. SDM sektor pariwisata terdiri atas:
 - a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah yang ditekankan pada kemampuan dan profesionalitas pegawai; kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.
 - b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat yang terdiri atas: 1) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi

kompetensi di setiap destinasi pariwisata; 2) kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan 3) kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yaitu peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan dan SDM pariwisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi wisata di Jawa Tengah yang menarik bagi wisatawan adalah wisata laut dan alam sehingga membutuhkan upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Tujuan favorit wisatawan adalah Dataran tinggi Dieng dan Karimun Jawa. Pengembangan model pariwisata diarahkan pada sektor alam dan kelautan. Berdasarkan AHP maka kebutuhan sektor Pariwisata adalah kebutuhan faktor infrastruktur, kelembagaan dan internal yang saling mengkait. Namun titik penting yang harus dikembangkan adalah pada peningkatan aksesibilitas sebagai pemenuhan infrastruktur sementara dalam pengembangan kelembagaan adalah perhatian penting dalam perlindungan ekologi, karena akan mendukung keberlanjutan wisata berbasis ekologi dan kelautan. Peran stakeholder penting dalam pengembangan wisata yang terdiri atas (1) penguatan struktur industri wisata, (2) peningkatan daya saing produk wisata, (3) penciptaan kredibilitas bisnis, (4) pengembangan kemitraan usaha wisata, (5) pengembangan tanggung jawab lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashok, S., Tewari, H. R., Behera, M. D., & Majumdar, A. (2017). Development of ecotourism sustainability assessment framework employing Delphi, C&I and participatory methods: A case study of KBR, West Sikkim, India. *Tourism Management Perspectives*, *1*, 24–41. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.10.005>
- Ferdinan, Y., Makmur, M., Ribawanto Jurusan Administrasi Publik, H., Ilmu Administrasi, F., & Brawijaya, U. (2123). Pengembangan Wisata Alam Berbasis Ekowisata dalam Prespektif Pelayanan Publik (Studi pada Disparbud Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *3*(12), 2123–2127.
- Idajati, H., Pamungkas, A., & Vely Kukinul, S. (2016). The Level of Participation in Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *227*(November 2015), 515–520. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.109>
- John Creswell. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles: Sage Publication Ltd.
- Mankiw, G. (2008). *Microeconomic* (Fifth Edit). Mason: Cengage Learning.
- Mosammam, H. M., Sarrafi, M., Nia, J. T., & Heidari, S. (2016). Typology of the ecotourism development approach and an evaluation from the sustainability view: The case of Mazandaran Province, Iran. *Tourism Management Perspectives*, *18*, 168–178. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.03.004>
- Song, D., & Kuwahara, S. (2016). Ecotourism and World Natural Heritage: Its influence on islands in Japan. *Journal of Marine and Island Cultures*, *5*(1), 36–46. <https://doi.org/10.1016/j.imic.2016.05.006>

4.3. Wista jateng_aden

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Shangchen Ha, Zhaoping Yang. "Evaluation for landscape aesthetic value of the Natural World Heritage Site", Environmental Monitoring and Assessment, 2019

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off